

TESIS

**INVESTIGASI FORENSIK DIGITAL DALAM
PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI**



Diajukan Oleh :

**FAUZI SANJAYA
NIM 2220215310018**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

Juni 2024

INVESTIGASI FORENSIK DIGITAL DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI

**Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Magister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

Diajukan Oleh :

**FAUZI SANJAYA
NIM 2220215310018**

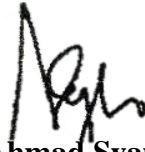
**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

Juni 2024

Judul Tesis : **UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP IDENTITAS ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA**
Nama : **JODDI ADITYA INDRAWAN**
NIM : **2120215310099**

**Disetujui,
Komisi Pembimbing**

Pembimbing Utama



Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.
NIP. 19720208199903 1 004

Diketahui,

**Koordinator Program Magister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.
NIP. 19720208199903 1 004



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615200312 1 001

Tanggal Lulus :

Tanggal Wisuda :

SANJAYA, FAUZI. 2024. “ Investigasi Forensik Digital Dalam Pembuktian Tindak Pidana Korupsi”. Program Magister Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing : Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H. 102 Halaman.

RINGKASAN

Uraian didalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 5 tidak secara spesifik menjelaskan tentang investigasi forensik bukti digital. Pasal 5 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur tentang informasi elektronik dan dokumentasi sebagai alat bukti hukum yang sah, tetapi tidak memberikan detail tentang prosedur investigasi forensik digital yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis bukti digital. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa untuk mencegah terjadinya perbedaan penafsiran terhadap Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Mahkamah menegaskan bahwa setiap intersepsi harus dilakukan secara sah, terlebih lagi dalam rangka penegakan hukum. Oleh karena itu, Mahkamah dalam amar putusannya menambahkan kata atau frasa “khususnya” terhadap frasa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik”. Agar tidak terjadi penafsiran bahwa putusan tersebut akan mempersempit makna atau arti yang terdapat di dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, untuk memberikan kepastian hukum keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti perlu dipertegas kembali dalam Penjelasan Pasal 5 Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Akibatnya, masih terdapat perkara korupsi yang tidak menerapkan forensik digital dalam pembuktiannya. Padahal, bukti elektronik telah diakui dalam sistem hukum pembuktian Indonesia sepanjang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Penjelasan yang kurang rinci dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 menimbulkan kekaburan hukum.

Investigasi forensik digital telah membuktikan dirinya sebagai alat yang sangat berharga dalam menangani kasus korupsi. Dengan teknik analisis yang canggih dan keahlian yang mendalam, para ahli forensik dapat mengungkap kebenaran yang tersembunyi di balik data digital. Dengan adanya bukti yang kuat, para pelaku korupsi tidak akan bisa lagi menyembunyikan kejahatan mereka. Bagi masyarakat dan pemerintah untuk terus mendukung pengembangan investigasi forensik digital dan memastikan bahwa para ahli forensik memiliki sumber daya yang cukup untuk melakukan pekerjaan yang penting ini. Untuk menganalisa kasus korupsi yang menggunakan pendekatan investigasi forensik digital memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana data elektronik digali, dipulihkan, dan diinterpretasikan untuk mengungkap pola korupsi. Melalui langkah-langkah metodologis yang ketat, ditemukan bukti-bukti digital yang kuat untuk memperkuat tindakan hukum terhadap pelaku kejahatan korupsi. Analisis ini juga menyoroti tantangan dan keberhasilan yang ditemui dalam proses penggunaan teknologi forensik dalam pembuktian kasus korupsi. Investigasi forensik digital memiliki implikasi yang signifikan dalam memfasilitasi pembuktian tindak korupsi. Lewat metode ilmiah, investigasi forensik digital dapat membantu mengumpulkan, menganalisis, dan memastikan integritas bukti digital yang digunakan dalam proses hukum.

Potensi peluang dan inovasi di masa depan dalam pengaturan investigasi forensik digital melibatkan penggunaan teknologi blockchain yang sangat mutakhir. Teknologi ini dapat memastikan keaslian bukti digital secara sempurna, sejalan dengan kemajuan teknologi informasi terkini. Penerapan teknologi ini akan menyediakan pengumpulan dan penyimpanan bukti digital yang lebih sekuriti, sambil secara otomatis memverifikasi keabsahan dan integritas data. Keberlanjutan teknologi dan inovasi dalam bidang pengaturan investigasi forensik digital akan membawa dampak positif bagi kegiatan penegakan hukum secara keseluruhan. Dengan terus mengikuti perkembangan teknologi dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan digital, pengungkapan kasus kejahatan melalui metode investigasi ini akan menjadi lebih efisien dan efektif. Kemajuan dalam teknologi blockchain, pengembangan algoritma kecerdasan buatan yang lebih canggih, dan

integrasi teknik kriptografi yang lebih kuat adalah langkah strategis yang dapat meningkatkan efektivitas dan kehandalan investigasi forensik digital .Didalam skenario masa depan yang semakin canggih dan terhubung, investigasi forensik digital akan memainkan peran penting dalam tindak pidana korupsi.

SANJAYA, FAUZI. 2024. “Investigasi Forensik Digital Dalam Pembuktian Tindak Pidana Korupsi”. Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing : Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. 102 Halaman.

ABSTRAK

Kata Kunci : Investigasi Forensik, Pembuktian, Korupsi.

Tujuan penelitian tesis yang berjudul Investigasi Forensik Digital Dalam Pembuktian Tindak Pidana Korupsi untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan investigasi forensik digital dalam memfasilitasi pembuktian tindak Pidana korupsi serta untuk mengkaji dan menganalisis kekuatan hukum investigasi forensik digital dalam memfasilitasi pembuktian tindak Pidana korupsi. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah menggunakan jenis penelitian hukum normatif yaitu meneliti norma-norma dan asas-asas hukum yang berkenaan dengan masalah yang diteliti.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah Pertama pengaturan investigasi forensik digital dalam menganalisis barang bukti digital dalam pembuktian tindak pidana korupsi tidak secara khusus diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Namun, pengaturan mengenai alat bukti elektronik/digital diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 dapat menjadi dasar hukum dalam melakukan investigasi forensik digital. Kedua, investigasi forensik digital memiliki kekuatan hukum yang penting dalam memfasilitasi pembuktian tindak korupsi di Indonesia. Investigasi forensik digital memiliki potensi besar untuk memfasilitasi pembuktian tindak korupsi di Indonesia. Identifikasi dan analisis bukti digital secara cermat dapat menjadi kunci dalam menangani kasus korupsi dengan lebih efektif. Keberhasilan kasus-kasus korupsi yang diungkap melalui investigasi forensik digital juga menunjukkan pentingnya penggunaan teknologi dalam memerangi korupsi.

SANJAYA, FAUZI. 2024 Digital Forensic Investigation in Proving Corruption Crimes". Master of Law Program, faculty of Law, Lambung Mangkurat University. Advisor: Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H. 102 Pages.

ABSTRACT

Keywords: Forensic Investigation, Evidence, Corruption.

*The aim of the thesis research entitled Digital Forensic Investigation in Proving Crimes of Corruption is to examine and analyze the arrangements for digital forensic investigations in facilitating the proof of Crimes of Corruption and to study and analyze the legal power of digital forensic investigations in facilitating the proof of Crimes of Corruption. The type of research that the author uses is normative legal research, namely examining legal norms and principles relating to the problem being studied. The research results obtained are: **First**, the regulation of digital forensic investigations in analyzing digital evidence in proving criminal acts of corruption is not specifically regulated in the Criminal Procedure Code (KUHAP). However, regulations regarding electronic/digital evidence are regulated in the Information and Electronic Transactions Law Number 11 of 2008. The Information and Electronic Transactions Law Number 11 of 2008 can be the legal basis for conducting digital forensic investigations. **Second**, digital forensic investigations have important legal force in facilitating proof of corruption in Indonesia. Digital forensic investigations have great potential to facilitate proof of corruption in Indonesia. Careful identification and analysis of digital evidence can be key to handling corruption cases more effectively. The success of corruption cases uncovered through digital forensic investigations also shows the importance of using technology in fighting corruption.*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fauzi Sanjaya
NIM : 2220215310018
Program Studi : Magister Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di Perguruan Tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiarisme.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud diatas, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, 31 Mei 2024

Yang membuat pernyataan

Fauzi Sanjaya
NIM. 2220215310018

LEMBAR PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur kepada Allah Subhanawataala Tuhan yang Maha Esa dan atas dukungan dan doa dari orang-orang tercinta, akhirnya tesis ini dapat dirampungkan dengan baik dan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, dengan rasa bangga dan bahagia saya ucapkan rasa syukur dan terimakasih saya kepada:

Yang Maha Kuasa Allah subhanawataala karena hanya atas izin dan karuniaNya lah maka tesis ini dapat dibuat dan selesai pada waktunya

Puji syukur yang tak terhingga pada Allah sang penguasa alam yang meridhoi dan mengabulkan segala doa.

Kedua Orang tua tersayang H. Mahyuni (Alm) dan Hj. Marsiah, Isteri saya Dessy S.P., puteri dan putera saya tercinta Syifa Alya Mukhibita dan Muhammad Syafa Hamidzan. Serta kakak, ipar dan adik-adik saya, yang telah memberikan doa yang tiada henti untuk kesuksesan saya.

Bapak dan Ibu Dosen pembimbing, penguji dan pengajar, yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkan saya, memberikan bimbingan dan pelajaran yang tiada ternilai harganya, agar saya menjadi lebih baik. Terimakasih banyak Bapak dan Ibu dosen, jasa kalian akan selalu terpatri di hati.

Semoga ilmu yang saya dapat memberikan kontribusi untuk agama, keluarga, bangsa dan negara

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji syukur, hormat serta kemuliaan hanya bagi Allah SWT atas segala kasih, rahmat, karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan Judul **INVESTIGASI FORENSIK DIGITAL DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI**.

Penulisan Tesis ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Magister Hukum pada Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Di dalam penyelesaian tesis ini penulis banyak memperoleh bantuan baik berupa pengajaran, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak untuk penyempurnaan Tesis ini. Dalam kesempatan ini, penulis sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian studi penulis, yaitu kepada:

1. Yang Sangat Terpelajar Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, SH., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Yang Terpelajar Bapak Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, SH., M.H. selaku Koordinator Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan selaku Pembimbing Penulisan Tesis saya yang dengan kesabarannya serta di sela-sela kesibukan selalu berkesempatan untuk meluangkan waktu memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan Tesis ini;

3. Yang Terpelajar Bapak Prof. Dr. Suprpto, S.H., M.H. selaku penguji yang telah banyak memberikan masukan-masukan yang berharga bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini;
4. Yang Terpelajar Ibu Prof. Dr. Diana Haiti, S.H., M.H. selaku penguji yang telah banyak memberikan masukan-masukan yang berharga bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini;
5. Seluruh Dosen Pengajar dan Staf pada Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat atas ilmu yang diberikan sehingga penulis mendapatkan pengetahuan yang lebih serta memberikan pelayanan yang baik hingga penulis pada akhirnya dapat menyelesaikan studi;
6. Rekan-rekan satu angkatan 2022 dan teman-teman dari Kepolisian, atas kebersamaan dan keceriaan yang akan selalu dikenang dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari kekurangan dan kelemahan dari tesis ini. Oleh karenanya, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan dari berbagai pihak Akhir kata, penulis berharap tesis ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca terutama bagi yang ingin melanjutkan maupun mengembangkan tesis ini.

Hormat Penulis

Fauzi Sanjaya

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL DALAM	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN TESIS	
RINGKASAN	
ABSTRAK	
LEMBAR PERSEMBAHAN	
UCAPAN TERIMA KASIH	
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Keaslian Penelitian.....	10
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
E. Tinjauan Pustaka.....	12
F. Metode Penelitian.....	37
G. Sistematika Rencana Penulisan.....	42
BAB II PENGATURAN INVESTIGASI FORENSIK DIGITAL DALAM MEMFASILITASI PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI	44
A. Karakteristik Investigasi Forensik Digital.....	44
B. Penggunaan Digital Forensik dalam Pembuktian Tindak Pidana Korupsi	57
C. Implikasi Ketentuan Investigasi Forensik Digital Dalam Memfasilitasi Pembuktian Tindak Pidana Korupsi	68
BAB III KEKUATAN HUKUM INVESTIGASI FORENSIK DIGITAL DALAM MEMFASILITASI PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI	77
A. Urgensi Investigasi Forensik Digital dalam Memfasilitasi Pembuktian Tindak Pidana Korupsi..	77
B. Pengungkapan Bukti Digital Dalam Pembuktian Tindak Pidana Korupsi.....	84
C. Pengaturan kedepan Investigasi Forensik Digital dalam Tindak Pidana Korupsi.....	92
BAB IV PENUTUP.....	100

A. Kesimpulan.....	100
B. Saran	101

DAFTAR PUSTAKA
RIWAYAT HIDUP